

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS SOSIAL TAHUN 2018**



**DINAS SOSIAL KOTA DEPOK  
TAHUN 2019**

**DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**  
**TAHUN 2019**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2018 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah ditetapkan 4 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	Target tercapai
		Persentase TAGANA aktif	80%	75 %	100%	tercapai
2.	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP	B	D	33.7 %	Tidak Tercapai
		Persentase Aset kondisi baik	100%	100%	100%	Target tercapai
3.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	10%	0.046	0.46	Tidak tercapai
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	15%	16 %	106.7%	Target tercapai
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	25%	27.1%	108%	Target tercapai
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%	63.3%	84%	Target tidak tercapai
4.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	4 ruang lingkup	4 ruang lingkup	100 %	Target tercapai

Dari 4 sasaran strategis dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 5 indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai kinerja 100% dan 4 indikator kinerja sasaran strategis yang memperoleh capaian kinerja dibawah 100% .

Depok, Februari 2019  
Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drs. Achmad Kafrawi, MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611029 199103 1 005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2018 untuk menggambarkan program – program prioritas yang telah tercapai dengan baik dan program prioritas mana yang belum tercapai dengan baik dan perlu ditingkatkan dalam tiga tahun ke depan untuk capaian kinerja yang telah ditetapkan di akhir masa RPJMD 2016-2021. Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju good governance, mengukur capaian kinerja visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Depok, Renstra Dinas Sosial dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 disusun atas tekad dalam meningkatkan akuntabilitas menuju good governance sebagaimana diamanatkan TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, Bebas KKN.

Semoga LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Depok, Februari 2019

Kepala Dinas Sosial Kota Depok

**Drs. ACHMAD KAFRAWI, M.Si**  
NIP. 19611029 199103 1 005

## DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang penyusunan LAKIP Tahun 2018.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4. Susunan Organisasi .....	7
1.5. Sarana Prasarana .....	9
1.6. Sumber Daya Manusia.....	10
1.7. Permasalahan Utama .....	14
1.8. Sistematika Penyajian .....	15
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>17</b>
2.1. Rencana Strategis.....	17
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2018 .....	19
2.3 Perjanjian Kinerja .....	22
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>24</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	24
3.2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan realisasi kinerja tahun ini .....	26
3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis .....	27

3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional .....	29
3.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan .....	33
3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	38
3.7. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan kinerja .....	41
B. Realisasi Anggaran .....	47
 BAB IV : PENUTUP .....	 50
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .....	50
4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja .....	50
4.3. Strategi Pemecahan Masalah .....	51





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun Anggaran 2018 berdasarkan RENSTRA

Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, Peraturan Daerah kota Depok Nomor 10

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta Peraturan Walikota Depok Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan sosial;
- 4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 6) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas administrasi umum, pengkoordinasian dalam perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan Program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b) penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c) penyelenggaraan administrasi umum;
- d) penyusunan evaluasi dan laporan;
- e) penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- f) pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i) penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;
- j) pengelolaan keuangan Dinas;
- k) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l) pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m) pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**c. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial mengacu pada rencana strategis dinas;

- b) penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- c) penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- d) penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- e) pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial
- f) penyelenggaraan fasilitas bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial;
- g) pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ ahli/ instansi/ lembaga di tingkat kota/ provinsi/pusat.
- h) Pengelolaan data penyandang disabilitas dan tunasosial;
- i) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial lintas kota.
- j) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas dan tuna sosial di Kota Depok untuk mendukung peningkatan pengembangan pelayanan;
- k) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial;
- m) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Kaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b) Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitas perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial.
- e) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
- f) Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bago potensi sumber kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;

- d. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial dengan unit kerja/ ahli/instansi/ lembaga lainnya;
- f. Penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Unit Pelaksana Teknis Teknis Dinas (UPTD)**

- 1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang sosial dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**1.4. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Depok adalah sebagai berikut;

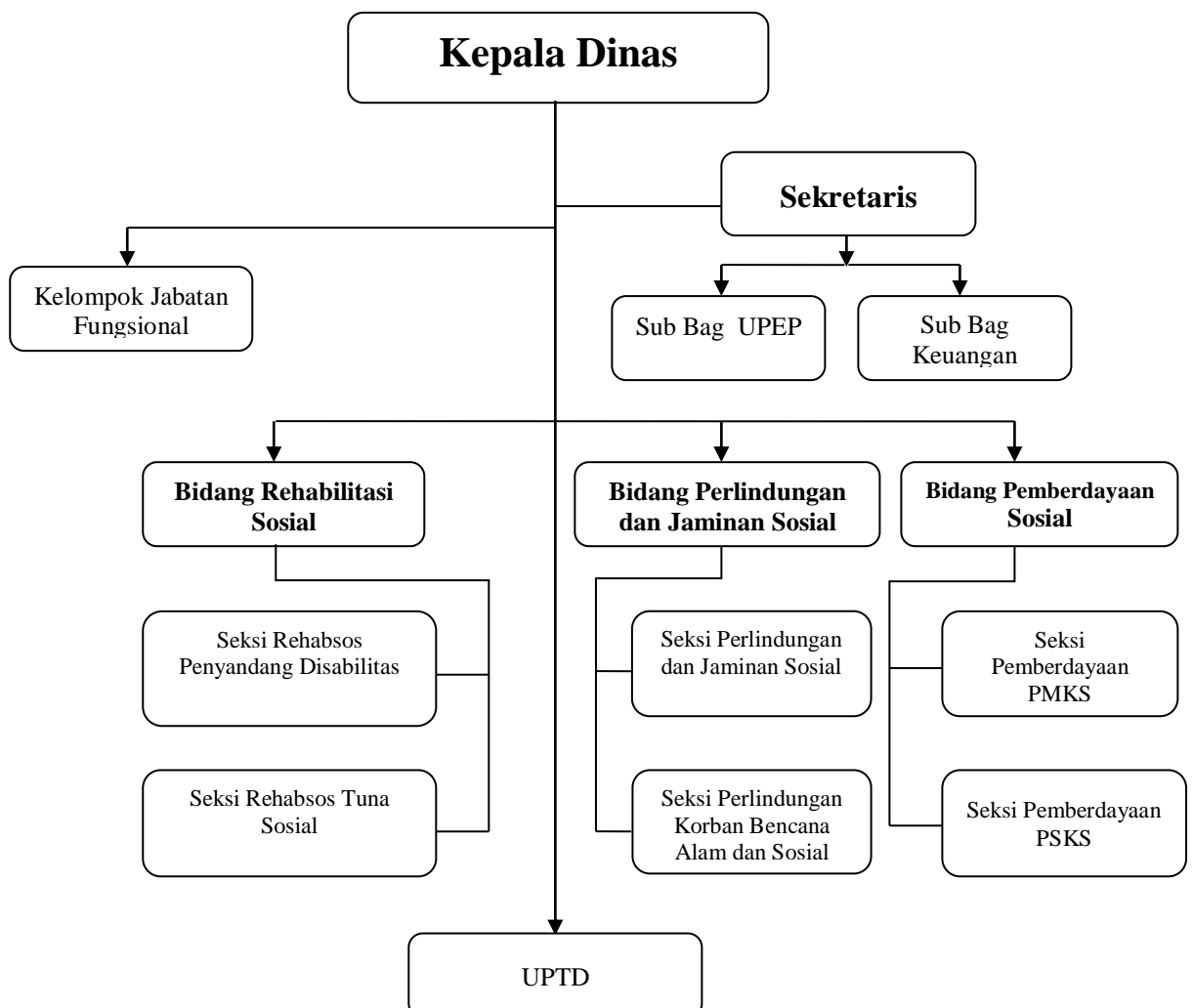
- a. Kepala Dinas, membawahi :
- b. Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - (2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 Seksi yaitu :
  - (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.;

- (2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 Seksi yaitu:
  - (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - (2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi 2 Seksi yaitu:
  - (1) Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas/ Kota Depok terdiri dari:

**Gambar 2.1**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**  
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016)





### **1.5. Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial. Barang/alat merupakan barang inventaris kantor adalah sebagai berikut :

#### **1. Gedung dan Bangunan**

Dinas Sosial Kota Depok menempati Gedung Dibaleka 2 Lantai 6 yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kota Depok, gedung milik Pemerintah Kota Depok. Ruang pelayanan berada di gedung yang sama di lantai 1 yang diperuntukkan sebagai ruang pelayanan bidang sosial.

#### **2. Sarana Mobilitas adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan pejabat baik roda empat maupun roda dua yang menjadi inventaris Dinas sosial Kota Depok tercatat sebagai berikut :**

- Kendaraan Dinas operasional/ jabatan roda empat : 5 unit
- Kendaraan Dinas operasional roda dua : 7 unit

#### **3. Peralatan dan perlengkapan**

Peralatan perlengkapan dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung operasional dinas baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan pelayanan dan kegiatan lainnya yang terdiri dari :

##### **a. Peralatan elektronik :**

- komputer : 19 unit
- laptop : 6 unit
- printer : 13 unit
- proyektor : 2 unit
- kamera CCTV : 2 unit
- wireless : 1 unit
- penghancur kertas : 8 unit
- telepon : 1 unit
- faximili : 1 unit
- TV LED : 1 unit

##### **b. Peralatan Mesin :**

Peralatan mesin dimaksud adalah peralatan yang dipergunakan sebagai perlengkapan gedung dan/atau peralatan kelancaran pelaksanaan operasional Dinas Sosial, sebagai berikut :

- Pompa air : 2 unit
- Genset : 1 unit

c. Perlengkapan kerja dan perlengkapan kantor

- Meja Kerja : 15 unit
- Kursi putar : 8 buah
- Kursi kerja biasa : 37 buah
- Kursi lipat : 15 buah
- Kursi tamu : 6 set
- Lemari besi : 8 unit
- Filing cabinet : 3 unit
- Lemari kayu : 1 unit
- Brankas : 2 unit
- Kursi tunggu : 1 unit
- White board : 1 unit

### 1.6. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Sumber Daya Manusia sampai akhir tahun 2018 sebanyak 38 orang PNS yang terdiri dari tenaga struktural sebanyak 13 orang dan pelaksana sebanyak 25 orang dan 1 orang tenaga Non PNS sehingga jumlah karyawan Dinas Sosial sebanyak 39 orang.

Dinas Sosial juga didukung oleh tenaga Pekerja Sosial yang berjumlah 11 orang (TKSK) .

**Tabel 1.1.**

**Sumber Daya PNS pada Dinas Sosial Tahun 2017**

No	Nama Pegawai	Gol .	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin	
						L	P
1	Drs. ACHMAD KAFRAWI, M.Si NIP. 196110291991031005	IV/ c	Kepala Dinas Sosial	II.b	S-2 ADMINISTRA SI NEGARA	L	

No	Nama Pegawai	Gol .	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin	
						L	P
2	KASIDI, SH NIP. 196104251986031007	IV/ a	Sekretaris pada Dinas Sosial	III.a	S.1 HUKM UMUM	L	
3	NITA ITA HERNITA, SH, M.Si NIP. 197410111998032005	IV/ a	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosia	III.b	S-2 ILMU ADMINISTRASI		P
4	dr. DEVI MARYORI, MKM NIP. 196803221999032002	IV/ a	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	III.b	S-2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT		P
5	DODI RUSTYADI, S.IP, M.Si NIP. 196409281985031003	IV/ a	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	III.b	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	L	
6	DWIJANTY JUSNIAR, S.Sos M.Si NIP. 196807181997022002	IV/ a	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	IV.a	S-2 ILMU ADMINISTRASI		P
7.	CARDI RUSYANDI, S.Sos, MM NIP. 196902181994031005	IV/ a	Pelaksana	Pelaksana	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	L	
8.	OTONG SUDARYA NIP. 196111101986031029	III/ d	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Bidang Linjamsos	IV.a	SLTA UMUM	L	
9.	ERMANILA, S.Pd	III/ d	Kepala Seksi Pemberdayaan PMKS	IV.a	S1 TARBIYAH		P
10	AAS KASMANAH, ST NIP. 196908212002122005	III/ d	Kepala Sub Bagian UPEP pada Sekretariat	IV.a	S.1 / TEKNIK		P
11.	Drs. DEDE RASTO	IV/ a	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial	IV.a	S1. ADMINISTRASI NEGARA		P



No	Nama Pegawai	Gol .	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin	
						L	P
12.	NUR IMPITA, S.KM NIP. 197305012006042014	III/ d	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial	IV.a	S.1 KESEHATAN MASYARAKAT		P
13	EDDY M., S.IP	III/ d	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Bidang Rehabilitasi Sosial	IV.a	S1/ STRATA SATU		
14	TRI REDJEKI HANDAYANI, S.Pd	III/ d	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial pada Bidang Linjamsos	IV.a	S.1 HUKUM		
15	MULIASRI ALI, S.Sos NIP. 197601041998032001	III/ d	Pelaksana	Pelaksana	S.1 / STRATA SATU		P
16	MESLIANA SARAGIH, S.KM NIP. 197601032005012009	III/ d	Pelaksana	Pelaksana	S.1 / STRATA SATU		P
17.	TEUKU ABDUL HADI, S.Kom NIP. 197809192006041004	III/c	Pelaksana	Pelaksana	S.1 SISTEM INFORMASI	L	
18.	RIRIN SETYORINI, S.Sos, MM NIP. 198301052005012002	III/c	Pelaksana	Pelaksana	S-2 MAGISTER MANAJEMEN		P
19.	NURLELI BR KARO NIP. 197110141993032005	III/ b	Pelaksana	Pelaksana	SMEA ADMINISTRASI PERKANTORAN		P
20	HERLAMBAWIDODO PERMADI, SE NIP. 197808132010011006	III/ b	Pelaksana	Pelaksana	S.1 EKONOMI	L	

No	Nama Pegawai	Gol	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin	
						L	P
21	AVI YUFRIDA HABSARI, SE NIP. 197902102011012003	III/ b	Pelaksana	Pelaksana	S.1 AKUNTANSI		P
22	ASISTI WULAN NINGRUM, SKM NIP. 198506262010012022	III/ b	Pelaksana	Pelaksana	S.1 / ILMU KESEHATAN MASYARAKA T		P
23	SUGIYANTO, S.Sos NIP. 198501032015031002	III/ a	Pelaksana	Pelaksana	S.1 / STRATA SATU	L	
24	SALEH BASUKI, SE NIP. 196712072002121003	III/ a	Pelaksana	Pelaksana	S.1 / ILMU EKONOMI	L	
25	MANUNAH	II/d	Pelaksana	Pelaksana	DIPLOMA III		p
26	SARI MULYANI	II/d	Pelaksana	Pelaksana	SMK		p
27	ARY PURWANTO, A.Md NIP. 197701222010011005	II/d	Pelaksana	Pelaksana	DIPLOMA III	L	
28	RHAMA KUSUMA SUMARNA NIP. 198304262002121005	II/d	Pelaksana	Pelaksana	SMU IPA	L	
29	NIKMAT	II/d	Pelaksana	Plaksana	PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	L	
30	DODI ANDIYANA NIP. 197711252002121005	II/c	Pelaksana	Pelaksana	SMA A.2 / BIOLOGI	L	
31	ANDI SOFYAN NIP. 196605282007011005	II/c	Pelaksana	Pelaksana	SMA A.3 / IPS	L	
32	KOMARUDIN NIP. 197310282007011007	II/c	Pelaksana	Pelaksana	SMA A.3 / IPS	L	
33	WAHYU SISKA RISDIANAWATI NIP. 198301242010012010	II/b	Pelaksana	Pelaksana	SMEA KESEKRE TARIATAN		P

No	Nama Pegawai	Gol	Jabatan	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin	
						L	P
34	DENNY SUPRATMAN NIP. 197607282008011003	II/b	Pelaksana	Pelaksana	SMA PAKET C	L	
35	APING NIP. 196202182001121001	II/b	Pelaksana	Pelaksana	PERSAMAAN SLTP (PAKET B)		L
36	DARMA HIDAYAT NIP. 196902242012121001	II/a	Pelaksana	Pelaksana	SEKOLAH MENENGAH ATAS		L
37	MARVIE SIOZA HAKIM NIP. 198303092009011005	II/a	Pelaksana	Pelaksana	SMU IPA		L
38	ARYADI NIP. 196207082014121002	II/a	Pelaksana	Pelaksana	SPG PENDIDIKAN SD		L

### 1.7. Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Dinas Sosial Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

1. Faktor SDM: sebagai aparatur di Dinas yang baru
2. Faktor Sarana dan Prasarana: masih kurang
3. Faktor Penganggaran: masih kurang
4. Faktor Kinerja: Pemahaman yang kurang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi

## 1.8. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi selama periode Tahun 2015. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2015 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015 yang akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**Ringkasan Eksekutif :** Menguraikan penerapan system akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

**Bab I – Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas penjelasan organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Kesehatan serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

**Bab II – Perencanaan Kinerja,** menjelaskan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2016 dan target pencapaian kinerja dalam RPJMD Kota Sukabumi tahun 2013-2018, serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2013-2018.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016,** menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selain itu diuraikan pula realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

**Bab IV– Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

## **Lampiran**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Sosial Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Depok. Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021.

Visi Kota Depok yaitu “**Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**” yang juga menjadi visi Dinas Sosial dengan Penjabaran Visi tersebut sebagai berikut:

- ❖ **Unggul** mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada Ketahanan Keluarga.
- ❖ **Nyaman** mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
- ❖ **Religius** mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi Kota Depok tersebut maka ada 4 misi yang sudah ditetapkan yaitu

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 2 misi tersebut yaitu misi pertama dan misi kedua. Untuk mendukung misi tersebut Dinas Sosial telah menetapkan 4 tujuan, 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial	Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial	Mewujudkan kualitas pelayanan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	Terwujudnya kemandirian PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS melalui upaya perlindungan dan jaminan, rehabilitasi, pelatihan dan pembinaan	Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Dimensi Kota Ramah Lansia	Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia

## 2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2018

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 merupakan proses rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, baik yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja program melalui kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan, maupun kegiatan baru dalam mendukung tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai maka diharapkan tujuan strategis terkait juga dapat dicapai. Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Secara keseluruhan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Dinas Sosial Kota Depok adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.** Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
			Persentase Tagana Aktif
2.	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP
			Persentase aset kondisi baik
3.	Terwujudnya kemandirian PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
			Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri
			Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial
	Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.** Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Sosial Tahun 2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Pada Tahun 2018
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %
		Persentase Tagana Aktif	80
3.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	10%
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	15 %
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	25% kumulatif
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%
	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	4 ruang lingkup

**Tabel 2.4.** Program Pendukung Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Sosial Tahun 2018

Perjanjian Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2018	Program/kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	1. Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial	Rp 357.066.000,-
		Persentase Tagana Aktif	75		
2.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	10%	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.285.557.500,-
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	20% kumulatif	2. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Rp 1.320.866.000,-
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%	3. Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1.819.950.000,-
3.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	2 Ruang lingkup	1. Program Pengembangan Kota Ramah Lansia	Rp 550.000.000,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Depok selama tahun 2018. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

#### 3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.** Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	Target tercapai
		Persentase TAGANA aktif	80 %	75 %	93.75%	Target tidak tercapai
2.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	10%	0.046 %	0.46%	Belum tercapai
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	15%	16 %	106.7%	Target tercapai
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	25%	27.1 %	108 %	Target tercapai
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%	63.50 %	84.60%	Target tidak tercapai
3.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	4 ruang lingkup	4 ruang lingkup	100 %	Target tercapai

\* **Analisis perbandingannya :**

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 3 sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai kinerja 100% dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian dibawah





100%. Pencapaian sasaran kinerja, baik yang mencapai/tidak mencapai target dipengaruhi faktor internal dan eksternal organisasi yang akan dijelaskan secara rinci pada sub bab 3.5.

### 3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

**Tabel 3.2.** Realisasi capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja	
	Uraian	Indikator Kinerja		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100 %	100%	100	100	100	100%
		Persentase TAGANA aktif	%	75%	80%	75	75	100	93.7%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	8%	10%	5.14	0.046 %	64.2	0.46%
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	%	10%	15%	10	16	100	106.7%
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	20%	25%	20%	27.1%	100	108%
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	70%	75%	70.3	63.5	100.43	84.7
3.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Ruang lingkup	2	4	2	4	100	100



**Analisis perbandingannya :**

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok pada tahun 2018 dengan tahun 2017 sebagai berikut : 4 Indikator tetap pada tingkat capaian 100% atau lebih, 3 indikator turun dari capaian tahun sebelumnya .

**3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis sebagai berikut :

**Tabel. 3.3.**

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 jangka menengah RENSTRA

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Realisasi	Target Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja		s/d 2018	s/d 2018
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100	100
		Persentase TAGANA aktif	%	75	80
2.	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP	kategori	D	B
		Persentase Aset kondisi baik	%	100	100



No.	Sasaran Strategis		Satuan	Realisasi	Target Renstra
	Uraian	Indikator Kinerja		s/d 2018	s/d 2018
3.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	0.046	10
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	%	16	15
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	27.1	25
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	63.5	75
4.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Ruang lingkup	4	4 ruang lingkup

**Analisis perbandingannya :**

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok masih ada yang belum mencapai target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021. Adapun realisasi kinerja yang belum sesuai tersebut adalah sebagai berikut : Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya , Nilai SAKIP dan Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial.



### 3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Depok ada yang terkait dengan standar nasional sebagai berikut

**Tabel. 3.4.**

Realisasi kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial

No	Standar Pelayanan Minimum	Program / Kegiatan	target	Capaian SPM
1.	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	80	95 %
2.	Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	-
3.	Persentase (%) Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS	80	100 %
4.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS	60	60.4 %



No	Standar Pelayanan Minimum	Program / Kegiatan	target	Capaian SPM
5.	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Program Penanganan Kabakaran, bencana Alam dan Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Korban Bencana alam dan Sosial	80	100 %
6.	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Program Penanganan Kabakaran, bencana Alam dan Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Korban Bencana alam dan Sosial	80	100 %
7.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan bagi penyandang Disabilitas. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial	40	100 %

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Depok terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelayanan Pemberian Bantuan sosial Bagi PMKS

**Permasalahan**

- a. Masih adanya masyarakat menerima bantuan sosial, yang belum mendapatkan haknya. Mereka memiliki kartu sebagai penerima bantuan sosial bagi PMKS, tetapi setiap bantuan didistribusikan ada yang belum dapat.



- b. Masih adanya keluhan masyarakat miskin yang merasa lebih berhak mendapatkan bantuan tapi tidak terdaftar sebagai penerima. Namun ada laporan bahwa mereka dianggap mampu oleh masyarakat sekitar, justru mendapatkan bantuan.
- c. Akses masyarakat terhadap informasi tentang pemberian bantuan social PMKS terkadang masih tidak jelas melalui siapa? Apakah melalui Kelurahan sebagai lembaga pemerintah yang terdekat dengan mereka atau ke Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang mewadahi perlindungan dan jaminan social masyarakat Kota Depok

#### **Solusi**

- a. Perlu koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Depok dengan lembaga terkait sehubungan dengan penyaluran bantuan social, antaranya Kementerian Sosial, Tim Pendamping PKH, TKSK, BPNT agar penyampaian ke masyarakat dapat berjalan dengan baik.
- b. Perlunya verifikasi data kemiskinan Kota Depok secara continue.
- c. Perlunya sosialisasi tentang aturan dan prosedur penerimaan bantuan social bagi PMKS baik kepada penyelenggara pemerintah ( ASN ) maupun kepada masyarakat PMKS sebagai penerima bantuan.

### 2) Pelayanan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Skala Kab/Kota

#### **Permasalahan**

- a. Belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- b. Belum adanya rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

#### **Solusi**

- a. Dilaksanakannya pengumpulan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS
- b. Menghitung pemenuhan pelayanan dasar
- c. Tersusunnya rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar.

### 3) Pelayanan Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Skala Kab/Kota

#### **Permasalahan**

Kota Depok tidak memiliki Panti Sosial, sehingga proses rehabilitasi social bagi PMKS belum maksimal.



**Solusi**

- a. Memanfaatkan Panti-panti social Kementerian Sosial

4) Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Skala Kab/Kota

**Permasalahan**

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia TAGANA
- b. Standar Bufferstock yang sesuai standard SPM Kota Depok ( Kwantitas dan kualitas )
- a. Manajemen logistic dan pergudangan
- b. Koordinasi dengan Provinsi dan Kementerian Sosial

**Solusi**

- a. Pelatihan, pembinaan, perekrutan taruna Siaga Bencana ( Tagana )
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana Tagana
- c. Standarisasi bantuan logistic sesuai dengan SPM Linjamsos ( Kwantitas dan kualitas dari sandang, pangan dan bantuan biaya hidup )
- d. Standar perlengkapan dapur umum
- e. Melakukan pelatihan dan pembinaan manajemen pergudangan ( logistic )
- f. Upaya koordinasi dengan pihak Provinsi dan Kementerian Sosial

5) Pelayanan Evakuasi Korban Bencana Skala Kab/Kota

**Permasalahan**

- a. Depok bukan daerah rawan bencana, sehingga belum memerlukan hal – hal yang berkaitan dengan lokasi untuk evakuasi bagi korban bencana alam, akan tetapi tetap memperhatikan standard penerapan evakuasi bagi korban bencana.

**Solusi**

- a. Pembuatan dapur umum, penyediaan perlengkapan evakuasi dan menyiapkan SDM yang handal.

6) Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Sosial skala Kab/Kota

**Permasalahan**

- a. Kurangnya kuota untuk KIS APBN dikarenakan pendataan, pencetakan kartu langsung dari Kementerian Kesehatan





### **Solusi**

- a. Diperlukan database yang terintegrasi data KIS APBN di Kota Depok untuk update data
- b. Perlunya kejelasan informasi mengenai program KIS APBN sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang valid
- c. Pembuatan papan pengumuman berupa banner yang disebarluaskan ke Kecamatan dan Kelurahan, agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan KIS APBN tersebut.

### **3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2018 Dinas Sosial Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kota Depok yang juga menjadi Visi Dinas Sosial Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”**. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

❖ **Misi Pertama:** “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan”

➤ Sasaran Strategis Pertama: Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial.

Sasaran Strategis Pertama mencapai kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel. 3.5.** Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dari Misi I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	tercapai
	Persentase TAGANA aktif	80 %	75 %	93.7%	Tidak tercapai

• Analisis penyebab kegagalan/ keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% diperoleh berkat pelaksanaan kegiatan tersebut terkoordinir dengan baik dengan instansi dan lembaga terkait dan peran serta dari organisasi penanganan bencana, dalam tiap kejadian dengan korban bencana sudah diberi bantuan yang tersampaikan tepat waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang tersampaikan tepat waktu.

Tercapainya indikator persentase TAGANA aktif dimana 30 yang aktif dari 40 anggota ( 75%) didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial sebagai mitra dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan koordinasi dengan TAGANA Propinsi Jawa Barat dan Pusat.

➤ Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan

**Tabel. 3.6.** Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua dari Misi I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1	Nilai SAKIP	B	D	67.3 %	Keterlambatan penyerahan Dokumen ke Tim Evaluasi



2.	Persentase Aset kondisi baik	100 %	100 %	100 %	tercapai
----	------------------------------	-------	-------	-------	----------

• Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:

Target sasaran strategis pada indikator nilai SAKIP tidak mencapai target disebabkan Keterlambatan penyerahan 4 dokumen dari 6 dokumen yang harus diserahkan.

Tercapainya indikator sasaran persentase Aset kondisi baik dengan nilai capaian 100% disebabkan oleh kondisi sebagian besar barang/peralatan masih baru sebagai hasil pengadaan tahun 2017 dan tahun 2018 dan barang/aset limpahan dari OPD lain dilakukannya pemeliharaan terhadap barang / peralatan yang kondisinya kurang baik, sehingga kondisi barang/aset pada tahun 2018 seluruhnya baik.

❖ **Misi Kedua:** “Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing”

➤ Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.

Sasaran Strategis Pertama tidak mencapai target kinerja pada satu indikator sebesar 0.04% . Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel. 3.7.** Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dari Misi II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	10%	0.046 %	0.46 %	<b>tidak tercapai</b>
2.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	15%	16 %	106.7%	tercapai



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
3.	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	20%	27.1 %	108 %	tercapai
4.	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%	63.5%	84.7 %	<b>Belum tercapai</b>

• Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja :

- a. Tidak tercapainya target prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya disebabkan oleh belum diperolehnya data dukung dan jumlah sasaran yang meningkat dari tahun sebelumnya sehingga tidak mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan: (merencanakan pemilahan data sesuai dengan indicator yang ditetapkan untuk meningkatkan upaya penanganan kemiskinan).

- b. Tercapainya Persentase penyandang disabilitas yang mandiri dengan nilai capaian kinerja 106.7 % diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi 75 Penyandang disabilitas dan 12 orang menjadi mandiri setelah mengikuti pelatihan. Data diperoleh berkat koordinasi yang baik serta adanya monitoring dari pelaksana kegiatan yang terus mengikuti sasaran setelah pelaksanaan kegiatan.
- c. Tercapainya PMKS yang mengalami perubahan perilaku dengan nilai capaian 180 % diperoleh berkat kegiatan pelaksanaan bimbingan maupun pelatihan terhadap PMKS yang diberikan sesuai dengan kebutuhan PMKS dan koordinasi yang baik dengan lembaga atau organisasi terkait dan adanya komunikasi yang mengikuti keberadaan dari PMKS yang sudah dilatih.
- d. Tidak Tercapainya sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja sebesar 84.7 % disebabkan dalam kegiatan pembinaan PSKS yang dapat dilakukan pada tahun 2018 tahap pendataan yang masih berlangsung



untuk memperoleh data yang akurat tentang PSKS yang terdaftar dan membina agar berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Alternatif solusi yang telah dilakukan: (merencanakan kegiatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial pada tahun berikutnya.)

➤ Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan Hak Hidup Dasar Lansia.

Sasaran Strategis Kedua mencapai kinerja sebesar 100 %. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel. 3.8** Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua dari Misi II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
4	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	4 Ruang Lingkup	4 Ruang Lingkup	100 %	Target tercapai : 1. Kebijakan Kelanjutusiaan 2. Kesehatan 3. Keagamaan dan Mental Spritual 4. Penghormatan dan Inklusi Sosial; 5. Partisipasi Sosial; 6. Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial

• Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja :

Tercapainya target Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia diperoleh dengan sudah diterapkan 4 (empat) dimensi yaitu Kebijakan kelanjutusiaan, Kesehatan, Keagamaan dan Mental Spritual, Penghormatan dan Inklusi Sosial; Partisipasi Sosial; Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial telah mencapai target yaitu 4 dimensi, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target ini didukung oleh Perwal sebagai kebijakan pendukung Pengembangan Kota Ramah Lansia dan untuk pengembangan dimensi lainnya di tahun berikutnya. Dalam mencapai setiap dimensi memerlukan peran serta dan pemahaman dari instansi terkait sehingga dukungan kebijakan sangat mempengaruhi dalam merealisasikan target. Pencapaian ini dilaksanakan melalui 1 program dan 3 kegiatan dengan anggaran belanja dari APBD.



### 3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 untuk masing masing sasaran strategis diuraikan sebagai

berikut:

❖ **Misi Pertama:** “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan”

➤ Sasaran Strategis Pertama: Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial.

Sasaran Strategis Pertama didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel. 3.9.** Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Pertama dari Misi I

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Anggaran	%	
1	Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial				
	Penyelenggaraan Pelayanan Bencana Alam dan Sosial	357.066.000,-	35.4441.380,-	99.3	2.624.620

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 357.066.000,- dengan realisasi sebesar Rp 35.4441.380,- . Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber dana sebesar Rp 2.624.620,- dan efektif untuk mencapai sasaran strategis tersebut.



➤ Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan

Sasaran Strategis Kedua dalam Misi I didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel. 3.10.** Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Kedua dari Misi I

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Anggaran	%	
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	787.338.000,-	784.563.540,-	99.6	2.774.460,-
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	435.450.000,-	398.002.450,-	91.4	37.447.550,-
3.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.700.000,-	43.445.000,-	85.7	7.255.000,-
4.	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	52.750.000,-	50.106.000,-	95.0	2.644.000,-
Jumlah		1.326.238.000,-	1.276.116.990,-	96.22	50.121.010,-

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 1.326.238.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.276.116.990,- . Sisa Anggaran sebesar Rp. 50.121.010,- yang menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 50.121.010,-



**Misi Kedua:** “Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing”

➤ Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.

Sasaran Strategis Pertama dalam Misi II didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel. 3.11.** Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Pertama dari Misi II

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Anggaran	%	
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.285.557.500,-	2.226.844.290,-	97.4	58.713.210,-
2.	Pemberdayaan Sosial	1.819.950.000 ,-	1.602.370.000,-	88.0	217.580.000,-
3.	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	1.320.866.000,-	897.583.271,-	68.0	423.282.729
Jumlah		5.426.373.500,-	4.726.797.561,-	87.1 0	699.575.939,-

Sasaran strategis ini dari 4 indikator, ada 2 indikator yang tidak tercapai. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 5.426.373.500,- dengan realisasi sebesar Rp 4.726.797.561,- . Anggaran tidak terserap sebesar Rp. 699.575.939,- namun tidak menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya karena ada indicator yang tidak tercapai.

➤ Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

Sasaran Strategis PKedua dalam Misi II didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel. 3.12.** Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Kedua dari Misi II





No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Anggaran	%	
	Program Pengembangan Kota Ramah Lansia	550.000.000,-	428,637,400,-	99.68	78.865.000,-
1.	Pembinaan Lansia	200.000.000,-	163.135.000,-	81.6	36.865.000,-
2.	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	300.000.000,-	258.000.000,-	86.93	42.000.000,-
3.	Pendataan Potensi Lansia	50.000.000,-	50.000.000,-	100	0

Sasaran strategis ini dari tercapai yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 471.135.000,- . Anggaran tidak terserap sebesar Rp. 78.865.000,- , hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya.

### 3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama dari Sasaran Strategis Pertama yang mencapai kinerja sebesar 100% didukung oleh Program Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Bencana Alam dan Sosial.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	TARGET	REALISASI KEGIATAN	
				CAPAIAN KEGIATAN	%
	<b>Program Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	<b>Persentase penanganan bencana alam dan bencana sosial</b>	100%	157%	157%
1	Tanggap Darurat Korban Bencana Alam dan Sosial	jumlah penanganan kejadian bencana	25 kejadian	76 kejadian, ,	304%
		jumlah anggota tagana	60 orang Tagana	40 orang Tagana	67 %
		tersedianya buffer stock	20 jenis	20 jenis	100%



Keluaran dari kegiatan ini adalah tertanganinya semua korban bencana alam dan sosial dengan penyaluran bahan logistic dari 20 jenis logistik yang disediakan yang dibutuhkan oleh korban bencana dengan tepat waktu dan terfasilitasinya anggota Tagana setiap penanganan kejadian bencana sebanyak 40 orang.

2. Indikator kedua dari Sasaran Strategis pertama ini didukung oleh Program Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sistem Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan, dan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan indikator Kondisi asset yang baik dengan tingkat capaian kinerja 100% didukung oleh Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan sasaran strategis kedua ini didukung oleh kegiatan : Matriks sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	TARGET	REALISASI KEGIATAN	
				CAPAIAN KEGIATAN	%
	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi perkantoran</b>	100%	100 %	100%
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	70 jenis	70 jenis	100%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis cetakan	13 jenis	13 jenis	100%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	13 jenis	13 jenis	100%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga	13 jenis	13 jenis	100%
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah jamuan makan minum	1500 jamuan	1500 jamuan	100%
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas/rakor	270 HOK	270 HOK	100%
	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	100%	82.21%	82.21 %
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana prasarana aparatur (kendaraan) terpelihara	4 unit roda 4 dan 7 unit roda 2	4 unit roda 4, 2 unit roda 2	100%
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	109 unit	88 unit	73.39 %
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	42 unit	42 unit	100%
	<b>Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>jumlah laporan kinerja dan keuangan per tahun</b>	2 lap,	2 lap,	100%
		<b>nilai LAKIP</b>	B	D	46.15
		<b>laporan kinerja,</b>	12 dok,	12 dok	100
		<b>laporan evaluasi kinerja</b>	4 lap	4 lap	100
12	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	jumlah laporan kinerja dan keuangan per tahun, nilai LAKIP, laporan kinerja, laporan evaluasi kinerja	18 dok	18 dok	100%
	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>	<b>cakupan dokumen perencanaan pembangunan</b>	100%	100%	100%
13	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	jumlah dok renja dan jumlah peserta forum OPD	1 dokumen	1 dokumen	100%



- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja  
Realisasi Fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya 12 laporan realisasi bulanan, 4 dokumen hasil monitoring triwulan dan 2 laporan kinerja tahun 2018
- b. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum OPD dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2019 dengan keluaran 1 dokumen hasil Forum OPD dan 1 dokumen Renja.
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Tersedianya 70 jenis ATK yang dibutuhkan dalam kegiatan administrasi dan Pelayanan di Dinas Sosial.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Tersedianya 13 jenis barang cetak yang mendukung kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial.
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Tersedianya 13 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor  
Tersedianya 13 jenis peralatan Rumah Tangga Kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial.
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Tersedianya 1500 sajian makanan dan snack untuk rapat dinas dan tamu, buah saji untuk tamu dan air minum kemasan gallon untuk harian pegawai.
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah  
Terfasilitasinya transport, uang harian maupun akomodasi bagi pegawai yang melakukan perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sebanyak 270 HOK.
- i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor  
Terpeliharanya 4 unit kendaraan Dinas roda 4 dan 7 unit roda 2 selama tahun 2018.
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/ Kantor  
Terpeliharanya 88 unit peralatan dan perlengkapan kantor.
- k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor berupa 13 unit computer, 3 unit laptop, 3 unit printer, 1 unit kamera proyektor, 5 unit penghancur kertas, meja, kursi, monitor TV.

3. Indikator untuk Sasaran Strategis kedua ada 4 indikator dengan mencapai 100% pada 3 indikator didukung oleh Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	TARGET	REALISASI KEGIATAN	
				CAPAIAN KEGIATAN	%
	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>persentase PMKS dan masyarakat beresiko sosial ditangani</b>	<b>45%</b>	<b>44.4%</b>	<b>98.67 %</b>
1	Pelayanan Santunan Kematian	jumlah terverifikasi	3150 jiwa	2396 jiwa	79.06 %
2	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan	jumlah KPM yang tertangani	100% (11421)	(188%) 21.568 KK	188%
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya TMP	1 TMP	1 TMP	100%
4.	Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	jumlah sasaran penerima jaminan sosial	2 kegiatan, 100.000 jiwa	2 kegiatan, 84.735 jiwa	90%
	<b>Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Jumlah sarana rehabilitasi sosial anak dan orang dengan ketelantaran</b>	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	
4	Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah	jumlah rumah singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah, 6 orang	94%
20	Penanganan Ketelantaran	Jumlah PMKS ketelantaran	500 orang	143 orang	34%
21	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	80 orang	50 orang	63%
22	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	Jumlah disabilitas yang dilatih	80 orang	75 orang	93.75 %
23	Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial	Renovasi Rumah Singgah	1 paket	-	0%
24	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dokumen Data PMKS	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang dilakukan rehabilitasi, jumlah PMKS yang mendapat bimbingan sosial/keterampilan per tahun, % PSKS yang mendapat pemberdayaan</b>	4.5%, 410 orang, 70%	44.61%, 220 orang, 60%	
23	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	jumlah yang mendapatkan pelatihan	300 orang	280 orang	93.3%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	TARGET	REALISASI KEGIATAN	
				CAPAIAN KEGIATAN	%
24	Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat	Jumlah alat bantu yang tersedia	3 jenis	-	0%
25	Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	Jumlah PMKS dan konselor yang dibina	90 ODHA dan 20 Konselor	90 ODHA	81,82 %
26	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap	Jumlah lembaga yang terawasi dan terkendali	100 LKS, 1 LK2S, 1 LK3 dan 30 Lembaga Penerima Bantuan	101 Lembaga	76%
27	Pengembangan Potensi Sumber Potensi Kesejahteraan dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS	Jumlah PSKS yang terlatih	63 orang Karang Taruna Kel, 11 TKSK, 38 LKSA	63 orang Karang Taruna Kel, 11 TKSK, 38 LKSA	100%
28	Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial)	Penanganan Keluarga Bermasalah Psikososial teratasi	1 LK3	1 LK3	100%

Sasaran strategis ketiga ini didukung oleh kegiatan :

a. Pelayanan Santunan Kematian

Dalam kegiatan ini telah dibayarkan kepada 2396 ahli waris dari keluarga miskin yang menerima santunan kematian.

b. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

Dalam tahun 2018 ada sebanyak 21.568 keluarga penerima manfaat yang sudah menerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

c. Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

Verifikasi dilakukan terhadap data keluarga Miskin untuk data PBDT yang akan menjadi sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dua kali dengan melibatkan 63 kelurahan.

d. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan sebanyak 2 kali dalam setahun dan terfasilitasi kegiatan upacara penghargaan jasa pahlawan di TMP.



- e. Pelayanan PMKS dalam Panti/ Rumah Singgah  
Beberapa PMKS Hasil penjangkauan atau yang diserahkan oleh mitra /instansi terkait memerlukan tempat sementara sebelum penanganan lebih lanjut atau pemulangan ke keluarga yang ditampung di Rumah Singgah ini sebanyak 61 PMKS dengan fasilitasi sandang dan pangan selama berada di Rumah Singgah.
  - f. Pelayanan Ketelantaran  
Selama Tahun 2018 sebanyak 143 orang dengan keteantaran telah ditangani oleh Dinas Sosial melalui kegiatan ini.
  - g. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
PMKS hasil penjangkauan yang ditangani oleh Seksi Rehab Tuna Sosial sebanyak 50 orang selama tahun 2018.
  - h. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas  
Kegiatan ini telah membimbing dan melatih 75 Penyandang Disabilitas.
  - i. Pelatihan Keterampilan bagi PMKS  
Seksi Pemberdayaan PMKS telah melatih 90 Org WRSE , 40 Org Lansia, 60 Org Anak Dalam Panti, 40 Org Keluarga Anak Jalanan, 40 Org Anak Jalanan dan 60 Org ODHA.
  - j. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat  
Tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan proposal dalam pengajuan sebagai hibah kepada masyarakat.
  - k. Bimbingan dan Konselor bagi PMKS  
Untuk memberdayakan PMKS telah dilakukan Pelatihan khusus bagi 90 ODHA.
  - l. Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS  
PSKS Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Karang Taruna di 63 kelurahan dan TKSK di 11 kecamatan dan 36 Panti.
4. Untuk Sasaran Strategis Keempat yang mencapai kinerja sebesar 100% didukung oleh Program Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan kegiatan :



NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator	TARGET	REALISASI KEGIATAN	
				CAPAIAN KEGIATAN	%
	<b>Program Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>jumlah ruang lingkup kota ramah lansia</b>	<b>4 ruang lingkup</b>	4 ruang lingkup	100%
1	Pembinaan Lansia Potensial	Jumlah Lansia terbina	720 orang	540 orang	75%
2	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	jumlah kegiatan rangkaian HLUN	5kegiatan	5 keg	100%
3	Pendataan Lanjut Usia	Terdatanya Lansia Potensial dan Non potensial	1 dok, 11 Kec	1 dok, 11 Kec	100%

a. Pembinaan Lansia

Sasaran dari Pembinaan Lansia Terbinanya Lansia Potensial dan Non potensial yang aktif berperan serta dalam pengembangan Kota Ramah Lansia.

b. Penyelenggaraan HLUN

PPenyelenggaraan HLUN dilaksanakan dengan 5 rangkaian kegiatan yaitu, seminar lansia, Duta Lansia, Perlombaan Lansia, Road show dan Gebyar Puncak Perayaan HLUN.

c. Pendataan Lansia

Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Data Lansia Potensial dan Non Potensial di 11 Kecamatan.

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Depok sebesar Rp 12.672.333.521,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.012.656.021,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 7.659.677.500,- sedangkan



Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 11.296.766.196,00 (89,15) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.470.020.265,00 (89,17%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 6.826.745.931,00 (89,13%). Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 3.13.** Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	357.066.000,00
		Persentase TAGANA aktif	80 %	75 %	93,7%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	8%	0,046	0,46%	5.426.373.500,-
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	15%	16%	106,7%	
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	25%	27,1%	100%	
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	70%	63,3%	84%	
3.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	4 ruang lingkup	4 ruang lingkup	100 %	550.000.000,00
Jumlah						<b>6.333.439.500,-</b>





Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel. 3.14.**  
**Target dan Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018**

No.	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>2.285.557.500,-</b>	<b>2.226.844.290,-</b>	<b>97.4</b>
1.1	Pelayanan Santunan Kematian	257.125.000,-	250.765.000,-	97.5
1.2	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan	1.385.870.500,-	1.381.118.000,-	99.7
1.3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	98.040.000,-	95.982.290,-	97.9
1.4	Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	544.522.000,-	498.979.000,-	91.6
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1.819.950.000,-</b>	<b>1.602.370.000,-</b>	<b>88.0</b>
2.1	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	675.000.000,-	656.195.000,-	97.2
2.2	Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat	152.000.000,-	4.880.000,-	3.2
2.3	Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	225.000.000,-	215.101.000,-	96.5
2.4	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap	150.000.000,-	125.706.000,-	83.8
2.5	Pengembangan Potensi Sumber Potensi Kesejahteraan dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS	499.950.000,-	485.938.000,-	97.2
2.6	Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial)	120.000.000,-	114.550.000,-	95.5
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.320.866.000,-</b>	<b>897.583.271,-</b>	<b>68.0</b>
3.1	Pelayanan PMKS di Rumah Perlindungan Sosial	403.925.000,-	275.746.031,-	68.3
3.2	Penanganan Orang Terlantar	333.800.000,-	253.542.240,-	76.0
3.3	Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	83.131.000,-	55.441.000,-	66.7
3.4	Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas	243.700.000,-	236.910.000,-	97.2
3.5	Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial	160.960.000,-	0	0
3.6	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	95.350.000,-	75.944.000,-	79.6



No.	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>4</b>	<b>Program Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	<b>357.066.000,-,-</b>	<b>357.066.000,-</b>	<b>99.3</b>
4.1	Penyelenggaraan Pelayanan Bencana Alam dan Sosial	357.066.000,-	357.066.000,-	99.3
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Kota Ramah Lansia</b>	<b>550.000.000,-</b>	<b>471.135.000,-</b>	<b>85.7</b>
5.1	Pembinaan Lansia	200.000.000,-	163.135.000,-	83.8
5.2	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	300.000.000,-	258.000.000,-	86.0
5.3	Pendataan Lansia	50.000.000,-	50.000.000,-	100
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>787.338.000,-</b>	<b>784.563.540,-</b>	<b>99.6</b>
6.1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	140.000.000,-	139.708.890,-	99.8
6.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.500.000,-	119.792.450,-	99.4
6.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000,-	16.000.000,-	100
6.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,-	25.000.000,-	100
6.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	185.900.000,-	185.900.000,-	100
6.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	298.162.200,-	345.065.231,00	99.4
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>435.450.000,-</b>	<b>398.002.450,-</b>	<b>91.4</b>
7.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	120.000.000,-	114.454.950,-	95.4
7.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	57.750.000,-	30.135.000,-	52.2
7.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.700.000,-	253.412.500,-	98.3
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>50.700.000,-,-</b>	<b>43.445.000,-</b>	<b>85.7</b>
8.1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	50.700.000,-	43.445.000,00	85.7
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>	<b>52.750.000,-</b>	<b>50.106.000,-</b>	<b>95.0,-</b>
9.1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	52.750.000,-	50.106.000,-	95.0
	<b>Jumlah</b>	<b>7.659.677.500,-</b>	<b>6.828.490.931,-</b>	<b>89.1</b>



Dari tabel diatas dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran yang rendah (<60%) yaitu :

1. Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial

Anggaran Kegiatan ini dialokasikan untuk Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial dalam bentuk renovasi gedung Rumah Perlindungan Sosial. Alokasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 160.960.000,- dan tidak direalisasikan (realisasi 0%). Penyebab rendahnya penyerapan anggaran ini adalah Kegiatan Pemeliharaan RPS yang berupa renovasi gedung akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman .

2. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Anggaran Kegiatan ini dialokasikan untuk Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas. Alokasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 152.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.880.000,- atau sebesar 3.2 %. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk Bantuan social yang harus memenuhi persyaratan sesuai Perwal No. 17 tahun 2016 yaitu proposal harus masuk sebelum musrenbang dan tercantum dalam RKPD, sedangkan pengajuan hanya ada pengantar dari kelurahan sehingga tidak memenuhi persyaratan.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran Kegiatan ini dialokasikan untuk Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial. Alokasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 57.750.000,- dan realisasi Rp 30.135.000,- (52.2%). Penyebab rendahnya penyerapan anggaran ini adalah Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor yang dianggarkan sebanyak 22 jenis, tapi hanya 6 jenis mengalami kerusakan dan yang memerlukan pemeliharaan/perawatan sehingga realisasi anggaran hanya 52,2%.

Sedangkan Kegiatan yang memiliki penyerapan cukup baik (60% - 80 %) adalah :

1. Pelayanan PMKS dalam Rumah Perlindungan Sosial

Anggaran Kegiatan ini dialokasikan untuk kegiatan pelayanan PMKS di Rumah Perlindungan Sosial. Alokasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 403.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp 275.746.031,- atau sebesar 68.3%. Penyebab penyerapan anggaran kegiatan hanya 68.3 % adalah pelaksanaan kegiatan memfasilitasi kebutuhan PMKS yang ada di Rumah Perlindungan Sosial , yang direncanakan untuk 192 PMKS, tapi realisasi PMKS yang ada di RPS hanya 61orang.



2. Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kegiatan ini dialokasikan untuk Pembinaan PMKS, Alokasi anggaran sebesar Rp 83.131.000,- dengan realisasi sebesar Rp 55.441.000,- atau sebesar 66.7%. Realisasi kinerja tidak tercapai yaitu dari PMKS yang direhabilitasi target 80 orang realisasi 50 orang (62.5%) tapi Penyerapan anggaran yang hanya 66.7 % ini disebabkan oleh jumlah PMKS hasil penjangkauan yang perlu direhabilitasi hanya 50 orang.

3.. Penanganan Orang Terlantar

Kegiatan dilakukan dalam penanganan orang terlantar dengan alokasi dana Rp 333.800.000,- dan realisasi Rp 253.542.240,- (76%) Realisasi Kinerja tidak tercapai yaitu 143 orang terlantar ( 34%) dari target 500 orang. Kegiatan ini melayani orang terlantar, dan yang tercatat hanya OT yang merupakan hasil laporan dari kepolisian dan Sat Pol PP dan OT tersebut menerima transport , sementara Ketelantaran yang sudah ditangani tapi tidak menerima transport tidak tercatat sehingga data realisasi jauh di bawah target.

4.. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan data PMKS di Depok. Anggaran Kegiatan Rp. 95.350.000,- dengan realisasi 75.944.000,- (79.6%). Realisasi Kinerja tercapai dengan adanya 1 dokumen pendataan PMKS, sehingga dalam hal ini ada efisiensi anggaran.

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan tingkat realisasi dan penyerapan anggaran kegiatan Dinas Sosial, dari 31 kegiatan :

- a. Berkategori baik (realisasi 80%-100%): 24 kegiatan (77.4 %)
- b. Berkategori cukup baik (realisasi 60%-80%) : 4 kegiatan (12.9 %)
- c. Berkategori kurang baik (<60%) : 3 kegiatan (9.7%)



## BAB IV P E N U T U P

### 4.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018, pada prinsipnya tidak hanya dijadikan sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan laporan, melalui format-format yang disediakan dalam konteks konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melainkan hal tersebut menjadi sumber informasi dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi pada umumnya, dan aparatur pada khususnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 4 (empat) sasaran strategis berdasarkan RENSTRA Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2017-2021 diketahui bahwa dari 9 (sembilan) indikator ada 4 (empat) indikator sasaran mencapai kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	Target tercapai
		Persentase TAGANA aktif	80%	75 %	100%	tercapai
2.	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP	B	D	33.7 %	Tidak Tercapai
		Persentase Aset kondisi baik	100%	100%	100%	Target tercapai
3.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	10%	0.046	0.46	Tidak tercapai
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	15%	16 %	106.7%	Target tercapai
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	25%	27.1%	108%	Target tercapai
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%	63.3%	84%	Target tidak tercapai
4.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	4 ruang lingkup	4 ruang lingkup	100 %	Target tercapai



Pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh 9 (sembilan) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

#### **4.2. KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA**

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian kinerja sasaran strategik serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dalam pengukuran kinerja adalah kesulitan dalam melakukan penyamaan persepsi, terutama jika melakukan penilaian terhadap aktivitas yang kriteria penilaiannya adalah keberdayagunaannya. Oleh karena itu kriteria penilaian harus dirancang dalam konsep pemahaman yang mudah dipahami, namun tetap memberikan derajat kemampuan menilai yang tinggi
- b. Dinas Sosial yang baru terbentuk di tahun 2017, dimana sebagian besar SDM dengan latar dari instansi diluar urusan sosial sehingga masih memerlukan proses pemahaman tentang sasaran dan indikator urusan sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi..
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan.
- d. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar produk akhir Dinas Sosial merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan pihak luar (OPD dan Stakeholder lain dalam manajemen pembangunan), dimana hal tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan, yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.
- e. Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan terkini



#### 4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Adapun strategi pemecahan masalah adalah dengan dilakukannya :

1. Penyesuaian persepsi dalam pengukuran kinerja,
2. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
3. Perlu dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan eksternalitas organisasi.
4. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan disemua bidang/sector.
5. Meningkatkan fungsi keberadaan website Dinas Sosial dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan bidang-bidang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2018 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Depok, 12 Februari 2019  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA DEPOK

**Drs. ACHMAD KAFRAWI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611029 199103 1 005